

---

**RELEVANSI PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP  
TERWUJUDNYA WILAYAH PERTAHANAN YANG BERTUMPU  
PADA PULAU-PULAU BESAR  
(STUDI KASUS PADA LANTAMAL III/JAKARTA)**

Oleh

Endra Kusuma<sup>1)</sup>, Syaiful Anwar<sup>2)</sup>, Helda Risman<sup>3)</sup>, Ruslan Arief<sup>4)</sup>

Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan Semesta  
Universitas Pertahanan, IPSC, Sentul, Bogor, Indonesia

Email: [1sakti426@gmail.com](mailto:sakti426@gmail.com)

**Abstract**

The Main Naval Base III Jakarta as a regional command unit has a role in preparing formidable space, tools and fighting conditions by empowering marine defense areas through fostering maritime potential (binpotmar) as part of the Archipelago Marine Defense Strategy (SPLN). In its implementation, national defense at sea must follow the defense policy set by the state. Currently, the government has ratified the general policy of state defense for 2020-2024 with one of the policy targets being the realization of a defense area based on large islands. With the determination of this national defense policy, it is necessary to synchronize the SPLN that has been carried out by the Navy with one of the strategic objectives of the policy. The purpose of this study is to determine the relationship between the empowerment of the marine defense area through BinPotmar and elements in an effort to realize a defense area based on large islands. This study uses a qualitative research method with a Grunded Theory approach using relevance theory, role theory, coaching theory, Sea Power theory and logistics theory. The results of the study conclude that the empowerment of marine defense areas through binpotmar has relevance to the realization of defense areas that rely on large islands.

**Keywords: Role, Base, Empowerment, Defense, Relevance.**

**PENDAHULUAN**

Posisi strategis Indonesia baik secara geostrategi, geoekonomi dan geopolitik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangsih terhadap perkembangan lingkungan strategis baik global kawasan. Dinamika yang perlu dicermati dalam kurun lima tahun ke depan diantaranya pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer khususnya di

kawasan Asia Pasifik. kecenderungan perlombaan senjata dan proliferasi senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction/WMD*), modernisasi militer, konflik intra dan antar negara, konflik perbatasan, keamanan informasi dan pertahanan siber, spionase, terorisme dan radikalisme yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas negara-negara di dunia, termasuk Indonesia

(Kemenhan RI, 2015). Menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis yang berkembang dan dimensi ancaman yang beragam maka harus dihadapi dengan kebijakan pertahanan yang fleksibel dan adaptif.

Merespon perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024. Kebijakan ini diarahkan kepada pembangunan postur pertahanan negara dengan sifat defensif aktif yang diaplikasikan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar dan selat strategis (Kemenkumham, 2021). Kebijakan ini kemudian menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara termasuk kebijakan pertahanan negara tahun 2021. Kebijakan pertahanan negara tahun 2021 menjadi satu visi dan misi dalam penjabaran kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. (Kemenhan RI, 2020).

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2021 adalah terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut. Sasaran kebijakan tersebut diwujudkan melalui tiga upaya yaitu pertama, penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan dalam satu kesatuan Tri Matra Terpadu untuk melaksanakan peperangan secara mandiri pada mandala luar, mandala utama, dan mandala dalam yang salah satunya menyelenggarakan perang berlarut. Kedua, penyiapan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional, guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI. Ketiga, mewujudkan

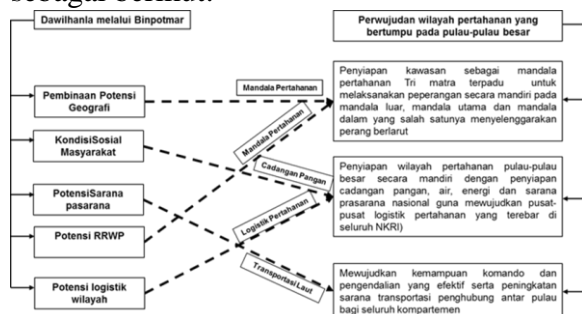
kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana transportasi penghubung antar pulau bagi seluruh kompartemen (Kemenhan RI, 2020).

Saat ini medan juang perlawanan di laut disiapkan oleh TNI AL melalui Strategi Pertahanan Laut Nusantara atau SPLN. Dalam penggelaran operasi laut sehari-hari unsur-unsur operasi sudah pasti tidak terlepas dari kesiapan dukungan pangkalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Milan Vigo dalam bukunya *Naval Strategy and Operations In Narrow Seas*, disampaikan bahwa satu tugas utama strategi Angkatan Laut di masa damai adalah membangun atau memperoleh pangkalan angkatan laut dan udara yang mencukupi untuk memungkinkan tujuan strategis nasional dan militer dapat tercapai di masa perang (M. Vego, 2005, p. 61). Hal ini menjelaskan bahwa Peran Pangkalan TNI AL sangat penting dalam implementasi strategi yang digunakan untuk pertahanan negara di laut. Pangkalan sendiri memiliki beberapa fungsi fungsi pendukung satuan operasional, fungsi keamanan laut dan terakhir adalah fungsi pemberdayaan matra laut (Mabes TNI AL, 2016).

Sampai dengan sekarang TNI AL telah memiliki 14 Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang tersebar di beberapa wilayah diseluruh Indonesia termasuk Lantamal III Jakarta. Lantamal III Jakarta memiliki nilai strategis dengan wilayah kerja menaungi ibu kota negara, memiliki Selat Sunda sebagai salah satu selat strategis dan *coke point* Indonesia. merujuk kepada perwujudan wilayah pertahanan, Lantamal III Jakarta sebagai komando kewilayahan memiliki fungsi yang melekat dengan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar) meliputi pembinaan terhadap potensi geografi, demografi, kondisi sosial masyarakat, sarana prasarana, rencana

rinci wilayah pertahanan dan logistik wilayah (Mabes TNI AL, 2018).

Dikaitkan dengan upaya terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut, peran Pangkalan TNI AL dalam hal ini Lantamal III Jakarta dalam pembinaan potensi maritim memiliki korelasi yang erat dengan pelaksanaan kegiatan didalamnya seperti pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial, Bakti TNI AL, dan pembinaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Secara umum korelasi peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui Binpotmar Lantamal III Jakarta terhadap upaya perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar dapat di ilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



**Gambar 1. Relevansi Binpotmar TNI AL terhadap terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar**  
 Sumber : Diolah oleh peneliti (2021)

Dari latar belakang tersebut perlu adanya pemahaman bagaimana korelasi atau hubungan antara pembinaan potensi maritim dihadapkan pada upaya dalam perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut dengan penyiapan mandala pertahanan, penyiapan cadangan pangan, peningkatan transportasi laut dan logistik pertahanan.

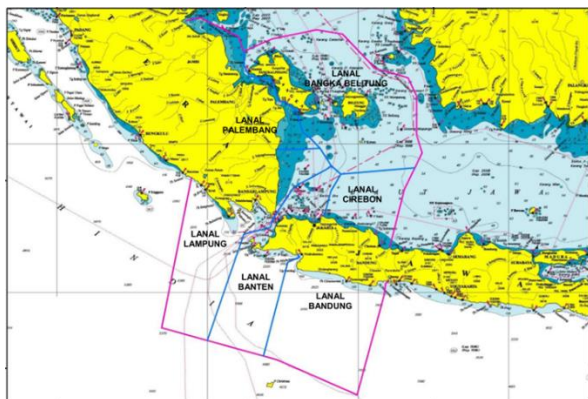
## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan *grounded theory* untuk menganalisis relevansi peran pangkalan TNI AL terhadap terwujudnya pertahanan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mendapatkan causalitas atau keterkaitan dari fenomena yang diteliti (Creswell, 2015). Penelitian dilaksanakan di Jakarta tepatnya di Mako Lantamal III Jakarta beserta jajarannya yang berada di Pulau Jawa yaitu Lanal Bandung, Banten dan Cirebon. Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi sumber tertulis berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran pembinaan teritorial matra laut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) dan dokumentasi atau gabungan semuanya (Sugiyono, 2011, p. 309). Analisa data menggunakan beberapa langkah menurut Creswell (2013) dengan analisis *coding* data untuk mengolah informasi sampai dengan didapatnya interpretasi data guna mengungkapkan esensi dari suatu gagasan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lantamal III adalah Komando Pelaksana Dukungan (Kolakduk) yang berkedudukan langsung di bawah Pangkoarmada I berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/11/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang Pembentukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III. Selaku pelaksana operasi lantamal III memiliki tugas melaksanakan operasi keamanan laut di wilayahnya dan meningkatkan daya guna dan hasil guna unsur-unsur secara optimal dalam pelaksanaan operasi keamanan laut. Untuk peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut dilaksanakan melalui pembinaan potensi maritim seperti potensi geografi, demografi,

sosial masyarakat pesisir, sarana prasarana maritim, rencana rinci wilayah pertahanan dan logistik wilayah (Mabes TNI AL, 2019).



**Gambar 2. Wilayah Kerja Lantamal III Jakarta**

**Sumber:** Mabesal (2016)

Wilayah kerja Lantamal III membawahi wilayah kerja Lanal Palembang, Lanal Lampung, Lanal Babel, Lanal Banten, Lanal Cirebon, Lanal Bandung dan perairan di sepanjang Teluk Jakarta serta Kepulauan Seribu. Batas wilayah kerja Lantamal III dimana sebelah Selatan berbatasan dengan ZEE Samudera Hindia dengan posisi antara  $06^{\circ} 22' 00''$  S -  $98^{\circ} 38' 00''$  T dan  $11^{\circ} 00' 00''$  S -  $108^{\circ} 45' 00''$  T. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Karimata (wilayah Operasi Lantamal XII). Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah operasi Lantamal II Padang tepatnya di propinsi Bengkulu, Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Sebelah Timur sudah memasuki wilayah Pulau Jawa, yang langsung berbatasan dengan daerah operasi Lantamal V, tepatnya di Tanjung Brebes, Cilacap sampai Pulau Nusa Kambangan. Selain itu wilayah kerja Lantamal III juga dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I) dan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain yaitu Australia. Luas perairan wilayah kerja Lantamal III  $537.038,2$  Km<sup>2</sup> (Spotmar, 2020).

## Peran Pemberdayaan Wilayah pertahanan Laut Melalui Binpotmar Lantamal III /Jakarta

Lantamal III selaku kotama pelaksana operasi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan operasi keamanan laut di wilayahnya dan meningkatkan daya guna dan hasil guna unsur-unsur secara optimal dalam pelaksanaan operasi keamanan laut. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lantamal III diantaranya melaksanakan fungsi penyelenggara pembinaan potensi nasional kekuatan maritim dan penyelenggara pembinaan wilayah pertahanan laut.

Pembinaan terhadap potensi geografi maritim yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta bertujuan untuk memperoleh data potensi wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung tugas pertahanan negara di laut khususnya di wilayah kerja Lantamal III. Sebagaimana Mahan dalam teori *Sea Power* menempatkan elemen geografi sebagai elemen pertama dalam penyusun kekuatan laut suatu bangsa. Mahan memandang pentingnya posisi geografi yang dapat memisahkan ancaman yang lebih besar di darat sebagaimana posisi menguntungkan Inggris dan Amerika dari ancaman potensial Perancis di benua (Samuel, 2018). Hal senada juga disampaikan oleh sir Julian Corbett bahwa kepentingan negara terbesar sebagian terletak di darat sehingga dalam perspektif strategi maritimnya Corbet menekankan pentingnya kekuatan di darat/geografi mendukung strategi Angkatan Laut di laut (Bartholomees, 2012).

Dalam pelaksanaannya pembinaan potensi geografi ini dilaksanakan dengan menggandeng pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat. Pembinaan potensi geografi ini merupakan bagian dari peran pangkalan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Peran dalam pembinaan potensi geografi ini sebagaimana teori peran yang disampaikan oleh Sarwono (2014)

mengandung pengertian peran sebagai alat komunikasi. Peran disini digunakan untuk didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan (Sarwono, 2014). Pembinaan potensi geografi Lantamal III Jakarta lebih difokuskan kepada pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi wilayah, medan, sumberdaya alam dan buatan yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisa untuk kepentingan pertahanan negara khususnya di wilayah kerja Lantamal III Jakarta. Setelah informasi tentang data-data geografi terkumpul selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi operasi atau penyiapan wilayah pertahanan.

Lebih lanjut lagi Sarwono mendeskripsikan peran sebagai alat komunikasi dimana persepsi ini dilandasi pada suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang berguna untuk mewujudkan keputusan yang responsif. Informasi yang didapat dari pembinaan potensi geografi maritim baik melalui pengamatan langsung maupun dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait dapat menjadikan peran Lantamal sebagai komando kewilayahan memunculkan keputusan strategis terkait penggunaan dan penataan ruang wilayah pertahanan.

Sementara David dalam pemikirannya yang dituangkan dari perspektif *Army concept*, lingkup peran memiliki pengertian sebagai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas baik dalam operasi militer maupun operasi militer selain perang (David S, 2013). Lantamal III Jakarta sesuai tugasnya dalam melaksanakan peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut pada pembinaan potensi geografi melaksanakan pengumpulan data yang dituangkan dalam analisa daerah operasi menjadi bagian dari tugas pangkalan yang

berfungsi memberikan data wilayah untuk kebutuhan operasi. Dari aspek pembinaan sesuai dengan pengertian dalam tesaurus bahasa Indonesia memiliki arti pemeliharaan, pemertahanan dan pembaharuan (Depdiknas, 2008), maka Lantamal III Jakarta terus melaksanakan pembaharuan data geografi yang disiapkan sebagai mandala operasi untuk pertahanan.

Dalam aspek kegiatan pembinaan demografi yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta diupayakan untuk memperoleh kondisi juang sumber daya manusia yang memiliki nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran bela negara dan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan yang timbul, baik secara individu maupun kelompok di wilayah kerja Lantamal III. Peran pangkalan yang dijalankan dilaksanakan melalui pemberian edukasi kepramukaan, pembinaan mental dan kejuangan pada usia sekolah serta pembinaan kepada organisasi kepemudaan dan olah raga air. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengaruh, menanamkan hal positif, meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan mental kejuangan pada usia muda masyarakat sekitar. Sebagaimana teori pembinaan yang disampaikan oleh mangundiharja (1992) dimana pembinaan merupakan proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani, secara lebih efektif (Mangunhardjana, 1992).

Sementara itu peran pangkalan yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta sebagaimana dengan teori peran yang disampaikan oleh Sarwono (2014) dalam aspek peran sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peran pangkalan

dalam aspek pembinaan potensi demografi maritim ini adalah salah satu strategi upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai SDM yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan negara. kekuatan demografi maritim ini nantinya akan digunakan sebagai kekuatan pengganda bagi komponen pertahanan utama di laut untuk memperoleh kekuatan laut yang handal sebagaimana teori *Sea power* AT Mahan dimana karakter penduduk atau bangsa yang bervisi maritim sebagai salah satu elemen syarat pembentuk kekuatan laut suatu bangsa (Alfred Thayer Mahan, 1890).

Sebagaimana hasil dari pengolahan data yang dilakukan pada tahap sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa pembinaan kondisi sosial masyarakat maritim di wilayah kerja Lantamal III lebih difokuskan kepada upaya perbaikan kondisi hidup dan perekonomian masyarakat pesisir. Indikasi tersebut dapat dilihat dari frekwensi pemberian bantuan kepada masyarakat yang lebih banyak dilakukan dalam masa satu tahun program kerja binpotmar Lantamal III dibandingkan dengan program sosial lainnya selain bantuan sosial karena bencana. Pemberian bantuan banyak dilakukan untuk memberikan pendampingan dan dukungan pada upaya peningkatan taraf hidup yang lebih baik seperti perbantuan budidaya ikan ternak dan ikan tangkap, bantuan sarana untuk kelompok nelayan dan sebagainya.

Pembinaan pada kondisi sosial masyarakat ini memiliki kesamaan dengan pembinaan pada demografi maritim dimana peran yang dilaksanakan oleh pangkalan dalam hal ini Lantamal III adalah merupakan bagian dari strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. sebagaimana aspek dalam teori peran yang disampaikan oleh sarwono (2014). Kondisi lingkungan yang kondusif dengan adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan institusi TNI AL akan memberikan

kemudahan bagi TNI AL untuk mendapatkan respon positif ketika masyarakat dibutuhkan dalam mendukung usaha-usaha pertahanan di laut. Secara tidak langsung pembinaan sosial masyarakat melalui upaya perbaikan perekonomian dengan peningkatan penghasilan ini juga berdampak kepada upaya penyapan logistik wilayah dimana hasil panen dari budidaya ikan kolam dan ikan tangkap ini dapat digunakan untuk mendukung unsur-unsur TNI AL yang operasi di wilayah kerja Lantamal III. Konsep peran dalam pembinaan kondisi sosial masyarakat pesisir melalui bakti sosial kemasyarakata ini juga termasuk dalam perspektif peran dalam "*Army Capston concept*" yang menempatkan peran sebagai kapasitas pangkalan dalam melaksanakan operasi militer selain perang (David S, 2013).

Dalam pelaksanaan pembinaan pada sarana prasarana maritim Lantamal III Jakarta beserta jajarannya melaksanakan inventarisasi data, bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, industri jasa maritim dan instansi terkait lainnya. Sebagaimana salah satu fungsinya dimana pangkalan TNI AL melaksanakan pertahanan keamanan aspek laut dengan memberikan pengamanan pada sarana prasarana maritim seperti pelabuhan, sarana navigasi, alur pelayaran dan sarana transportasi laut menjadi bagian dari pembinaan pada potensi sarana prasarana sebagai sasaran dari pembinaan ketahanan wilayah yang dilaksanakan oleh Lantamal III dan jajarannya. Hal ini sesuai dengan Buku Petunjuk Induk Dawilhanla dalam peraturan Kasal No 39/VII/2011 yang menjelaskan bahwa sarana prasarana laut/maritim berupa sarana angkut seperti kapal baik angkut personel, barang dan minyak serta kapal survey dan prasarana seperti pelabuhan, depo bahan bakar dan fasilitas pemeliharaan (Mabes TNI AL, 2011).

Peran pembinaan pada sarana prasarana ini lebih kepada salah satu peran yaitu sebagai alat komunikasi sebagaimana teori peran yang

disampaikan oleh Sarwono (2014) dimana peran didayagunakan dari persepsi bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat. Pembinaan melalui pengamanan potensi sarana prasarana maritim sebagai bentuk tanggungjawab tugas TNI AL sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut. Selain itu peran dalam pembinaan ini berkaitan dengan hubungan saling ketergantungan satu dengan lainnya dalam artian TNI AL dalam hal ini pangkalan membutuhkan dukungan sarana prasarana swasta atau nasional dalam mendukung tugas-tugasnya, dilain pihak kehadiran TNI AL sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman di wilayah. Peran dalam pembinaan ini sebagaimana disampaikan dalam teori peran Biddle & Thomas (1996) bahwa tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Pada dasarnya pembinaan sarana prasarana maritim ini didasari kepada adanya kerjasama antara Lantamal III dan pemerintah daerah serta instansi kemaritman terkait di wilayah kerja Lantamal III.

Selanjutnya Lantamal III Jakarta dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyiapan rencana rinci wlayah pertahanan (RRWP) melalui pengelolaan wilayah pertahanan dengan pendataan dan penataan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai mandala pertahanan berupa pangkalan militer, instalasi militer, daerah latihan militer, medan-medan kritis. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi non pemerintah dengan mensosialisasikan wilayah ruang pertahanan yang dibina oleh Lantamal III Jakarta untuk kepentingan pertahanan. Pada dasarnya pembinaan pada RRWP tidak berbeda jauh dengan pembinaan yang dilaksanakan pada potensi geografi dimana *out put* yang dihasilkan adalah ketersediaan wilayah atau daerah yang dipersiapkan untuk kepentingan pertahanan. Dari kegiatan yang sama tersebut maka peran pangkalan yang dilaksanakan juga memiliki arti

yang sama sebagaimana disampaikan oleh Sarwono (2014) yaitu peran sebagai alat komunikasi yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi dalam suatu proses pengambil keputusan. Perencanaan Rinci wilayah pertahanan dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, instansi lain baik sipil maupun militer untuk mendapatkan data dan informasi wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai mandala pertahanan.

Dari segi pembinaan hubungan yang dibangun oleh Lantamal III Jakarta dengan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi lain lebih bersifat kepada pendekatan *informative* (*Informative Approach*) (Mangunhardjana, 1992), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik yang dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman. Peserta didik ini bukan dalam artian yang sebenarnya namun lebih kepada rekan atau kolega dalam melaksanakan kegiatan perencanaan RRWP. Pembinaan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan instansi lainnya tentang pentingnya perencanaan dan penyiapan wilayah untuk pertahanan.

Logistik wilayah merupakan salah satu obyek dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Sesuai dengan yang disebutkan dalam doktrin pemberdayaan wilayah pertahanan laut bahwa logistik wilayah merupakan logistik pertahanan laut yang bertumpu bertumpu pada kekayaan sumber daya wilayah termasuk cadangan materiil strategis yang ada di daerah (Mabes TNI AL, 2018). Lebih rinci keterangan tentang logistik wiayah ini dijelaskan dalam buku petunjuk induk pemberdayaan wilayah petahanan laut dalam Perkasal No 39/VII/2011 yang memberikan pengertian tentang cadangan materiil strategis merupakan bahan hasil pertambangan dan alat peralatan hasil industri untuk pertahanan laut yang dipersiapkan

sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan pertahanan laut dalam jangka waktu tertentu pada keadaan darurat (Mabes TNI AL, 2011).

Secara umum Lantamal III telah melaksanakan pembinaan terhadap potensi logistik wilayah sebagaimana dimaksud dalam dua ketentuan tersebut. Lantamal III telah melaksanakan pembinaan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjamin kelestarian, produktifitas, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memberikan pengaman terhadap obyek vital menjaga dari kerusakan akibat ulah pihak yang tidak bertanggungjawab. Peran pangkalan yang dilakukan ini termasuk dalam peran sebagai strategi sebagaimana teori yang disampaikan oleh Sarwono (2014) dimana peran digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam hal ini sumber logistik nasional. Selain itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Lantamal III untuk melaksanakan perannya dalam keamanan laut sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi pangkalan di wilayah. Peran ini sesuai dengan pendapat David dalam “*Army Capston concept*” dimana ada keterkaitan yang cukup erat antara definisi peran sebagai sinonim dari *capacity*, *position*, *responsibility*, dan *duty* disesuaikan dengan lingkup tugas yang diembannya baik dalam *military operation for war* ataupun *military operation other than war* (David S, 2013).

Peran sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat juga digunakan dalam pembinaan logistik wilayah yang dilakukan oleh Lantamal III Jakarta dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerja dengan memberikan bantuan edukasi, pendampingan dan bantuan berupa bibit ikan ternak ataupun sarana budidaya dan penangkapan ikan di laut kepada masyarakat desa binaan. Logistik wilayah dalam pengertiannya tidak hanya kepada keberadaan

cadangan materiil strategis namun juga adanya ketersediaan bahan pangan melalui budidaya ternak, perkebunan dan perikanan (Mabes TNI AL, 2011).

Dari aspek pembinaan maka pembinaan terhadap potensi logistik wilayah ini cenderung memiliki makna yang sama dengan pendekatan yang dilakukan oleh Mangunhardjana (1992) dimana pembinaan dilakukan melalui pendekatan pendekatan eksperiansial (*Experiencial Approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut. Kembali pada pengertian peserta didik disini lebih kepada partner atau rekan kerja dalam hal ini instansi terkait dan masyarakat. Lantamal III mengajak para penggiat potensi logistik wilayah ini untuk ikut terlibat langsung dalam produktivitas, kelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam dan buatan sebagai sumber logistik wilayah.

### **Relevansi Peran Pemberdayaan Wilayah pertahanan Laut Melalui Binpotmar Lantamal III/Jakarta Terhadap Perwujudan Wilayah Pertahanan yang Bertumpu pada Pulau-pulau Besar**

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan amanat rakyat Indonesia kepada TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk membentuk kekuatan pertahanan yang utuh. Pertahanan yang bersatu padu dengan segenap komponen bangsa dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah menjadi satu kesatuan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Tujuannya adalah guna mewujudkan sebuah sistem pertahanan kemanan rakyat yang bersifat semesta yang terintegrasi dan padu. Oleh karena itu diperlukan kesiapan wilayah



nasional untuk menjadi mandala perang yang harus disiapkan secara dini dan tertata secara terpadu yang merupakan salah satu tugas TNI melalui upaya Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara khususnya Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dengan melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar). Dari Binpotmar ini dapat diketahui samai dimana relevansi atau hubungan yang terjadi dengan beberapa elemen dalam upaya pewujudan wilayah pertahanan yang betumpu pada pulau-puau besar.

Pembinaan potensi geografi merupakan salah satu dari upaya untuk menyiapkan mandala perang/pertahanan yang dibutuhkan pada saat negara dalam keadaan darurat. Mandala yang dalam pengertiannya menurut tesaurus bahasa Indonesia adalah berupa area, daerah, kawasan, lingkaran atau zona. Mandala yudha/perang merupakan daerah pertempuran, medan perang atau wilayah perang (Depdiknas, 2008). Pembinaan potensi geografi maritim yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta bertujuan untuk memperoleh hasil data-data tentang kondisi geografi di wilayah kerja yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan. Relevansi yang terjadi antara pembinaan pada potensi geografi maritim dengan mandala perang adalah tersedianya kawasan, ruang, atau zona yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan pertempuran jika terjadi konflik dengan pihak lain/negara lain yang terjadi di wilayah NKRI. Sebagaimana teori relevansi yang disampaikan oleh Sperber dan Wilson bahwa suatu asumsi merupakan relevan dalam suatu konteks jika dan hanya jika ia memiliki dampak kontekstual dalam konteks tersebut (Wijayanto, 2015). Dalam permasalahan ini dikaitkan dengan bahwa usaha-usaha yang dilaksanakan dalam pembinaan potensi geografi maritim ini memberikan dampak terhadap adanya wilayah/mandala yang akan disiapkan untuk pertahanan.

Lantamal III Jakarta dalam pembinaan potensi geografi maritim ini telah dapat menentukan beberapa wilayah atau ruang yang akan dijadikan sebagai mandala pertahanan/perang berupa pantai pendaratan, jalan pendekat, medan kritis lindung tembak dan tinjau, daerah kapal selam, daerah penyelaman, daerah *explosive dumping* dan operasi laut. Potensi geografi ini juga menjadi bagian dari elemen pendukung kekuatan laut sebagaimana disampaikan oleh AT Mahan dalam "*Sea Power*". Letak geografis dapat mempengaruhi strategi yang digunakan dalam pertahanan laut dengan memperhatikan dimana kekuatan laut dapat dionsentrasikan atau disebar, dimana pangkalan dapat di tempatkan, kedekatan dengan sasaran, akses kekuatan laut ke laut lepas dan jalur utama (Anwar, 2018).

Jika diperhatikan lebih lanjut hasil pembinaan potensi maritim yang dilaksanakan oleh Lantamal III dengan beberapa penentuan zona/wilayah pertahanan maka sebagian besar berada pada wilayah mandala dalam yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan perang berlarut sebagaimana disebutkan dalam persiapan mandala pertahanan untuk perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Mandala pertahanan dalam ini juga dituangkan dalam Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang dilaksanakan oleh TNI AL. SPLN dalam pelaksanaan strategi kedua yaitu strategi pertahanan berlapis (*Layered Defense*) membagi wilayah pertahanan menjadi tiga bagian yaitu medan pertahanan penyanggah (luar batas ZEE), medan pertahanan utama (batas ZEE sampai Laut Teritorial) dan daerah perlawanan, yaitu daerah pertahanan lapis ke tiga yang merupakan daerah-daerah perlawanan, yang berada pada laut teritorial dan perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya berikut wilayah kompartemen strategis darat (Mabes TNI AL, 2004). Pangkalan TNI AL Lantamal III Jakarta sebagai komando kewilayahan memiliki tugas dan tanggung

jawab untuk menyiapkan wilayah pertahanan mendukung tugas-tugas TNI AL.

Pada pembinaan kondisi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta dan jajarannya di pulau Jawa lebih banyak dilakukan untuk membantu perbaikan kondisi perekonomian masyarakat desa binaan, maka pembinaan banyak diarahkan kepada pemberian bantuan kepada masyarakat pesisir berupa perbantuan budidaya ikan ternak dan ikan tangkap, pertanian, perkebunan pemanfaatan lahan produktif serta bantuan sarana untuk kelompok nelayan. Sebagaimana sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan kondisi sosial masyarakat maritim diarahkan untuk penyiapan kondisi juang yaitu kondisi masyarakat yang memiliki semangat juang, kesadaran bela negara, berwawasan kebangsaan yang tinggi, memelihara, melestarikan serta memanfaatkan sumber daya maritim untuk menopang kesejahteraan dan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup serta berwawasan kebangsaan (Mabes TNI AL, 2018).

Selain untuk perbaikan kondisi perekonomian masyarakat pembinaan ini dilakukan sekaligus untuk memenuhi pembinaan ketahanan wilayah dalam bidang ketahanan pangan. Dari hal tersebut kegiatan pembinaan kondisi sosial masyarakat ini memberikan efek kepada upaya penyiapan cadangan pangan di wilayah yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan saat negara dalam keadaan darurat. Sebagaimana teori relevansi yang disampaikan oleh wijayanto (2015) bahwa suatu asumsi merupakan relevan dalam suatu konteks jika dan hanya jika ia memiliki dampak kontekstual dalam konteks tersebut. Kegiatan pembinaan Lantamal III dalam rangka ketahanan pangan memberikan efek kepada upaya penyiapan cadangan pangan untuk pertahanan. Indikasi yang dapat diberikan adalah keterangan hasil dan masa panen yang dapat diprediksi di setiap

lokasi binaan dapat diyakinkan hasil pembinaan dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan untuk mendukung ketersediaan cadangan pangan. Hasil panen yang dijual dapat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat desa binaan sekaligus mempersiapkan ketersediaan cadangan pangan di wilayah.

Dalam hal Pembinaan potensi sarana prasarana maritim di wilayah kerja Lantama III Jakarta dilaksanakan dengan pendekatan pengamanan seperti sarana pelabuhan, kapal angkut, depo bahan bakar dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Hubungan yang dibentuk dengan adanya pembinaan potensi sarana prasarana maritim ini memberikan dampak kepada kelancaran aktivitas pelayaran baik lokal maupun internasional. Sebagaimana Corbett mengakui bahwa laut adalah arena ekonomi, dan Angkatan Laut ada untuk melindungi atau memajukan kepentingan maritim nasional dngna mengamankan jalur komunikasi atau perhubungan laut (Bartholomees, 2012). Selain dapat memberikan dampak kepada pelayaran, pembinaan yang dilakukan terhadap potensi sarana dan prasarana ini juga dapat berkontribusi terhadap ketersediaan logistik wilayah dimana kelancaran distribusi logistik juga bergantung kepada sarana prasaran maritim seperti pelabuhan bongkar muat, kapal angkut barang jalur navigasi dan lain sebagainya. Konsep keterkaitan ini sesuai dengan konsep sistem logistik Yusuf Ali (2013) bahwa sistem logistik adalah seluruh proses interaksi antara komponen yang meliputi Struktur Lokasi Fasilitas, Transportasi, Persediaan (*Inventory*), Komunikasi, serta Penanganan dan Penyimpanan, untuk mendapatkan barang yang tepat, atau jasa ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang diinginkan.

Kerjasama yang saling menguntungkan terjalin antara Lantamal III Jakarta dengan

*stake holder* terkait dimana Lantamal III selaku pelaksana operasi melaksanakan tugas operasi keamanan laut yang berkedudukan langsung dibawah Koarmada I. Dilain pihak para pemangku kepentingan di laut membutuhkan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas produksi mereka baik bidang jasa maupun produksi barang. Hubungan timbal balik ini sudah terlihat ketika unsur-unsur operasi membutuhkan fasilitas sandar di wilayah kerja Lanal Banten dan Cirebon yang belum memiliki dermaga sendiri dapat memanfaatkan fasilitas sandar dari jasa pelabuhan baik nasional maupun swasta di daerah.

Sesuai dengan teori relevansi yang dibangun dari hubungan kontekstualitas dimana satu kegiatan akan memberikan efek kepada kegiatan yang lainnya (Wijayanto, 2015). Pembinaan potensi sarana prasarana maritim seperti pelabuhan, rambu navigasi, alur pelayaran dan fasilitas sandar akan memberikan dampak kepada kelancaran aktivitas pelayaran dan distribusi logistik. Selain itu AT Mahan dalam teorinya *Sea Power* memberikan banyak perhatian kepada keberadaan pangkalan atau pelabuhan yang penting keberadaannya bagi kapal-kapal yang melakukan pelayaran. Tidak ada kapal yang dapat melakukan perjalanan panjang tanpa harus melaksanakan perbekalan ulang (D. M. Vego, 2009). Disini tampak sekali pentingnya sarana bekal ulang seperti pelabuhan dalam aktivitas pelayaran. Kondisi sarana prasarana yang terjamin ini turut memberikan dampak kepada peningkatan pelayaran.

Sementara itu pembinaan terhadap wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Lantamal III melalui kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi swasta untuk mendata, menginventarisasi dan menata tempat-tempat atau wilayah yang memiliki potensi mendukung pertahanan merupakan upaya dalam penyiapan mandala pertahanan di wilayah. Data-data berupa pangkalan militer, instalasi militer, daerah latihan militer, medan-

medan kritis, alur pelayaran merupakan data-data yang dibutuhkan untuk menyiapkan madala pertahanan di wilayah. Sebagaimana pada peran pembinaan berlaku teori peran sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan informasi. Dari informasi yang didapat ini memiliki kontekstualitas yang sama antara wilayah pertahanan dan penyiapan mandala pertahanan. Sesuai dengan teori relevansi bahwa komunikasi akan relevan apabila komunikasi tersebut memiliki efek konekstualitas. Efek kontekstualitas adalah hasil interaksi informasi baru dengan informasi lama, semakin besar efek kontekstualnya, semakin besar relevansinya (Wijayanto, 2015). Dalam hal ini semakin lengkap data informasi penataan ruang pertahanan akan semakin luas dan banyak mandala pertahanan yang dapat digunakan.

Pembinaan logistik dalam doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma termasuk dalam pembinaan kekuatan (Mabes TNI, 2010). Logistik wilayah merupakan logistik pertahanan laut yang bertumpu pada kekayaan sumber daya wilayah termasuk cadangan materiil strategis yang ada di daerah. Lantamal III sebagai komando kewilayahan melaksanakan pembinaan potensi logistik maritim dengan cara memberikan pengamanan terhadap obyek vital logistik sebagai cadangan strategis materiil dan pembinaan melalui pemberian bantuan dan pendampingan kepada masyarakat desa binaan dalam hal ketahanan pangan. Hubungan pembinaan logistik wilayah untuk kepentingan ekonomi dengan penyiapan logistik pertahanan sebagaimana disampaikan oleh Duncan Ballantine bahwa "logistik", menyediakan hubungan penting antara urusan ekonomi dan militer. mengungkapkan hal ini ketika dia menulis: "Sebagai penghubung antara front perang dan front dalam negeri, proses logistik sekaligus merupakan elemen militer dalam perekonomian negara dan elemen ekonomi dalam operasinya" (Eccles, 1959). Hal ini juga yang dilaksanakan oleh

Lantamal III dalam membina potensi logistik di wilayah kerja.

Logistik adalah jembatan antara ekonomi nasional dan operasi aktual pasukan tempur di lapangan. Dengan kata lain logistik beroperasi sebagai "ekonomi militer" dalam arti kata sepenuhnya. Oleh karena itu, logistik harus dilihat dari dua sudut pandang. Logistik berakar pada perekonomian nasional. Di wilayah ini didominasi oleh pengaruh sipil dan otoritas sipil. Di area ini kriteria utama logistik adalah efisiensi produksi. Di sisi lain, produk akhir logistik terletak pada operasi pasukan tempur. Di sana logistik didominasi oleh pengaruh militer dan otoritas militer (Eccles, 1959, p. 19). Pada masa damai logistik wilayah adalah menjadi domain sipil dalam pengelolaannya. Sumber-sumber logistik cadangan strategis materiil di wilayah kerja Lantamal III merupakan prerogatif sipil dalam pengolahannya untuk kepentingan nasional, namun demikian pada dasarnya hasil produkfitasnya juga salah satunya diperuntukkan untuk kepentingan pertahanan dalam pendistribusiannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa relevansi pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta beserta jajarannya di pulau Jawa memiliki keterkaitan terhadap upaya terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Kontribusi dari pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar memiliki persamaan dengan elemen-elemen yang ingin dicapai dalam konsep wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Dengan demikian pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar sebagai bagian dari Strategi Pertahanan Laut

Nusantara (SPLN) sekaligus dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Lebih lanjut penulis mencoba untuk mendesain kesimpulan akhir penelitian ini dengan deskripsi sesuai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar Lantamal III /Jakarta

Peran Lantamal III Jakarta beserta jajarannya di Pulau Jawa dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan masyarakat. Peran ini dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta sebagai strategi atau cara untuk mendapat dukungan dari masyarakat dalam bidang pertahanan dengan tidak mengganggu perspektif kepentingan masing-masing. Peran juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang potensi-potensi kemaritiman di wilayah kerja Lantamal III sekaligus memenuhi kaidah pendekatan informatif dalam teori pembinaan. Namun demikian pembinaan yang dilakukan lebih bersifat pendekatan partisipatif (*participative approach*) dengan mengajak langsung kepada obyek binaan dalam memanfaatkan potensi maritim yang ada di wilayah kerja Lantamal III.

b. Relevansi peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar Lantamal III /Jakarta terhadap perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar

Keterkaitan yang ditunjukkan antara pembinaan potensi maritim di wilayah kerja Lantamal III dengan beberapa elemen pendukung perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar merupakan hubungan dalam artian kontekstualitas dimana satu kegiatan akan memberikan efek atau dampak kepada kegiatan lainnya sesuai dengan kaidah dalam teori relevansi. Semakin tinggi intensitas binpotmar

yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta semakin besar pula potensi mewujudkan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa peran Lantamal III Jakarta dalam pembinaan potensi geografi maritim dan rencana rinci wilayah pertahanan berdampak kepada penyiapan ruang dalam hal ini mandala pertahanan. Pembinaan kondisi sosial masyarakat melalui upaya perbaikan berdampak kepada kemandirian pangan. Pembinaan sarana prasarana maritim melalui pengamanan berdampak kepada peningkatan pelayaran dan kelancaran distribusi logistik. Sementara pengamanan sumber-sumber logistik negara di wilayah berpengaruh juga kepada penyiapan logistik pertahanan.

#### Saran

- a. Lantamal III Jakarta dalam melaksanakan peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar dapat mengimplementasikan fungsi peran sebagai suatu kebijakan, strategi dan alat komunikasi terhadap semua objek dalam binpotmar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.
- b. Meningkatkan peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar sehingga peran Lantamal III Jakarta sebagai bagian dari instrumen SPLN sejalan dengan upaya dalam mewujudkan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfred Thayer Mahan. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783* (12th ed.). Little Brown and Company.  
<https://www.gutenberg.org/files/13529/13529-h/13529-h.htm>
- [2] Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90.  
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- [3] Bartholomees, J. B. (2012). *Naval Theory For Soldier* (Vol. 66).
- [4] Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan. In S. Z. Qudsy (Ed.), *Sage* (Cetakan I, Vol. 94, Issue 4). Pustaka Pelajar. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37624/1/penelitian.pdf>
- [5] David S, M. (2013). *Partnership, respect guide U.S. Military role in Philippines*. Worldpoliticsreview.  
<https://www.worldpoliticsreview.com/articles/12685/partnership-respect-guide-u-s-military-role-in-philippines>
- [6] Depdiknas. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia* (1st ed.). Pusat Bahasa.
- [7] Eccles, H. E. (1959). Logistics in the National Defense. *Military Affairs*, 23(4), 217. <https://doi.org/10.2307/1984612>
- [8] Kemenhan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan* (ketiga). Kementerian Pertahan Republik Indonesia.
- [9] Kemenhan RI. (2020). *Permenhan No 487 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021*.
- [10] Kemenkumham. (2021). *Perpres No 8 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024*. Kemensesneg RI.
- [11] Mabes TNI. (2010). Dotrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma EkaKarma (Tridek). In *Mabes TNI*.
- [12] Mabes TNI AL. (2004). *Strategi pertahanan laut nusantara* (No. 1207). Setumal.
- [13] Mabes TNI AL. (2011). *Bujukin Dawilhanla Perkasal/39/VII/2011*. Mabasal.
- [14] Mabes TNI AL. (2016). *Penataan Gelar dan Kasifikasi serta Batas Wilayah Kerja TNI AL* (No. 326).
- [15] Mabes TNI AL. (2018). *Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Kep Kasal No. Kep/2639/ VII/2018 Tgl 23 Juli 2018)*. Mabasal.
- [16] Mangunhardjana, A. (1992). *Pembinaan arti dan Metodenya* (ketiga). Kanisius.

- 
- [17] Samuel, E. R. (2018). *Julian Corbett and The Development of a Maritime Strategy*. 1–166.
- [18] Sarwono, S. W. (2014). *Teori-teori psikologi Sosial* (17th ed.). Rajawali Pers.
- [19] Spotmar, L. I. (2020). *Analisis Daerah Operasi Lantamal III Jakarta*. Lantamal III.
- [20] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (13th ed.). CV Alfa Beta.
- [21] Vego, D. M. (2009). *Naval Classical Thinkers*.
- [22] Vego, M. (2005). *Naval Strategy and Operation in Narrow Seas* (second). Frank Cass.
- [23] Wijayanto, A. (2015). Resensi buku teori relevansi; komunikasi dan kognisi. *Metalingua*, 13(1), 121–124.